

***"CORRUPTION AS A BASIS FOR ANNULMENT AND REFUSAL OF
ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL ARBITRATION AWARD IN THE
CASE BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE AND NAVAYO
INTERNATIONAL AG AND HUNGARIAN EXPORT CREDIT
INSURANCE"***

By: Faris Edwin Utama*, Herliana**

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of corruption as a basis for the annulment and refusal of enforcement of international arbitral awards, specifically in the case involving the Indonesian Ministry of Defense, Navayo International AG, and Hungarian Export Credit Insurance. The study examines how acts of corruption can influence international arbitral decisions, particularly in the context of public policy. Additionally, this thesis analyzes relevant legal regulations and existing case studies to provide an understanding of the application of public policy principles in international arbitration.

This research employs a normative juridical approach, supported by interviews with experts to reinforce the arguments and findings presented. The data utilized in this study is derived from a literature review of statutes, legal journals, and relevant legal instruments. The data used is derived from literature review of laws, legal journals, and other relevant sources. Data analysis is conducted using a qualitative method and is presented in a descriptive-analytical manner.

This research finds the legal construction of corruption can be used as a basis for annulling a decision by the International Court of Arbitration under Singaporean law. Corruption is construed as a violation of legal provisions, thus constituting a breach of public policy. Corruption offenses can also be categorized as violations of public order if they conflict with the norm, violate the prevailing laws and regulations in Indonesia, and infringe upon the sovereignty of the state and the legal sovereignty of the Republic of Indonesia. The Central Jakarta District Court, which examined the case between the Ministry of Defense and Navayo and HECI, can determine corruption offenses as violations of public order, given that there are court decisions proving that corruption occurred in the contract procurement process.

Keyword : international arbitration, corruption, public Policy

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email : Farisedwinutama@mail.ugm.ac.id

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Email : herliana@mail.ugm.ac.id

**“TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBATALAN DAN
PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DALAM PERKARA KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN *NAVAYO INTERNATIONAL AG* DAN *HUNGARIAN EXPORT
CREDIT INSURANCE*”**

Faris Edwin Utama* Herliana**

INTISARI

Penulisan tesis ini membahas tentang tindak pidana korupsi sebagai dasar untuk pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam perkara antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan *Navayo International AG* dan *Hungarian Export Credit Insurance*. Studi ini mengkaji bagaimana tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi putusan arbitrase internasional, khususnya dalam konteks ketertiban umum. Tesis ini juga menganalisis peraturan hukum yang relevan dan studi kasus yang ada untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip ketertiban umum dalam arbitrase internasional.

Penulisan Hukum ini merupakan yuridis normatif yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendukung argumentasi dan temuan dalam penulisan ini. Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang, jurnal hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penulisan ini merupakan konstruksi hukum tindak pidana korupsi dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan *International Court of Arbitration* berdasarkan hukum Singapura. Korupsi dikonstruksikan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga merupakan pelanggaran kebijakan hukum (*public policy*). Tindak pidana korupsi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara Kementerian Pertahanan dengan Navayo dan HECI dapat menentukan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran ketertiban umum karena terdapat putusan pengadilan yang membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan kontrak.

Kata Kunci : *arbitrase internasioanl, tindak pidana korupsi, ketertiban umum*

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email :

Farisedwinutama@mail.ugm.ac.id

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Email : herliana@mail.ugm.ac.id